

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus penyebaran virus gangguan pernafasan atau yang dikenal sebagai Virus Corona masih menjadi masalah besar yang ada di dunia. Virus yang berasal dari negara Cina ini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terkena dampaknya baik dari segi ekonomi, politik, bahkan hingga mental masyarakat. Menurut laporan *Worldometer* pada 23 maret 2022 telah terjadi kasus terlapor hingga 474.766.341 kasus dari seluruh dunia dengan kesembuhan sebanyak 410.522.080 jiwa dan angka pasien meninggal dunia mencapai 6.122.896 jiwa. Angka paparan kasus tertinggi berasal dari Amerika Serikat yang berada pada kisaran 80 juta kasus, India 43 juta kasus, Brazil 28 juta kasus, Perancis 22 juta kasus, dan Inggris 18 juta kasus. Adapun Indonesia sendiri, jumlah kasus terlapor hingga tanggal 22 maret 2022 sebanyak 5.974.646 kasus, dengan tambahan sebanyak 5.639.029 jiwa sembuh dan 154.062 jiwa meninggal dunia.

Pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kasus pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan telah dilakukan, yaitu dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, menerapkan protokol Kesehatan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sesuai anjuran dari WHO, serta serbuan vaksinasi yang dibantu oleh TNI-POLRI

kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan total vaksinasi dosis pertama mencapai 195.229.531 jiwa, penduduk yang menerima dosis kedua mencapai 156.139.516 jiwa, dan penduduk yang menerima dosis ketiga mencapai 18.070.929 jiwa. Selain itu pemerintah juga melakukan dengan bekerjasama oleh para pejabat dan tokoh setempat dibantu TNI-POLRI dengan harapan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dapat terlaksana dan masyarakat dapat menyadari bahaya dan efek yang ditimbulkan oleh virus COVID-19.

Dampak dari penanganan tersebut, membuat angka penularan COVID-19 menjadi menurun. Namun dengan naiknya angka kesembuhan dan menurunnya angka penularan, masyarakat cenderung mulai melalaikan peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut data Razia Patuh Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya dan pihak-pihak yang terkait, sepanjang bulan Juli Hingga Awal Desember 2021, telah terdapat 2.760 kasus pelanggaran protokol kesehatan (Satpol PP, 2020). Respon masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan tentu berbeda-beda. Banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan karena melihat keluarga maupun teman-temannya patuh terhadap protokol kesehatan, kebijakan pemerintah, atau bahkan dengan terpaksa melakukannya. Bahkan sebagian besar dari masyarakat juga mematuhi pelaksanaan protokol COVID-19 karena takut dihukum atau takut terkena sanksi yang ditetapkan. Sisanya bahkan tidak menganggap COVID-19 sebagai penyakit berbahaya sehingga tidak perlu mematuhi. Sebuah survei yang dilakukan Badan

Pusat Statistika (BPS), 17 dari 100 responden memiliki persepsi bahwa sangat tidak mungkin atau tidak mungkin terinfeksi COVID-19 dengan rata-rata usia 17-30, 2,5% masyarakat menganggap bahwa penyebaran COVID-19 bukanlah sebuah ancaman atau hanya dibesar-besarkan, serta kurangnya pemahaman terhadap bahaya dan manfaat pencegahan (BPS, 2020).

Ketidakpatuhan bisa didefinisikan sebagai keengganan untuk melakukan perubahan perilaku sesuai dengan perintah langsung yang disampaikan oleh otoritas tertentu (Brehm & Kassin, 1996). Istilah ketidakpatuhan diciptakan oleh Henry David Thoreau tahun 1848 untuk menggambarkan penolakannya membayar pajak. Ketidakpatuhan ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, baik terorganisir atau tidak (Quigley & Bahmueller, 2001). Menurut Niven (2002), ketidakpatuhan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, pemahaman instruksi yang salah, kualitas interaksi yang kurang dengan pihak pemberi instruksi, dukungan sosial dan keluarga yang kurang maksimal, serta keyakinan yang salah, sikap dan kepribadian individu yang berbeda-beda.

Dalam kasus ketidakpatuhan terhadap COVID-19, pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Iptidaiyah, Abdul, Junaidin, dan Usman (2020) pada sebuah daerah di Bima, masyarakat tidak patuh dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menanggulangi pandemi. Banyaknya warga yang terkena Razia Patuh Protokol Kesehatan karena tidak patuh untuk memakai masker, lebih 500 masyarakat di kelurahan Oi Fo'o kota Bima yang dirazia dan diberi sanksi

berupa denda uang, denda fisik, seperti push up dan lari, dan denda menghafal Pancasila, dan lain-lain. Terdapat beberapa alasan masyarakat tidak patuh dengan peraturan protokol Kesehatan. Pertama mereka menyangkal bahwa virus itu ada atau tidak seburuk yang diberitakan oleh media massa. Kedua mereka berpikir bahwa mereka kebal terhadap virus dan tidak akan sakit parah. Ketiga mereka memberontak dan tidak mau mengikuti peraturan pemerintah, Keempat mereka bersikap impulsif karena merasa terkekang selama berbulan-bulan. Kelima mereka berfikir bahwa COVID-19 hanyalah sebuah alat politik pemerintah. Keenam mereka bersikap egois dengan mementingkan kepentingan dan kepuasan diri sendiri daripada kebaikan masyarakat yang lebih besar dalam memerangi COVID-19. Dari beberapa alasan masyarakat di atas menunjukkan bahwa adanya gejala disonansi kognitif pada fenomena Pandemi COVID-19.

Mispersepsi, adalah “kasus di mana keyakinan orang tentang hal-hal faktual tidak didukung oleh bukti yang jelas dan pendapat ahli”, dimana definisi yang mencakup keduanya menimbulkan keyakinan yang salah dan tidak berdasar tentang informasi tersebut (Nyhan & Reifler, 2010). Mispersepsi adalah dampak dari misinformasi yang mengacu pada komunikasi yang “salah, menyesatkan, atau berdasarkan informasi yang tidak berdasar” (Nyhan & Reifler, 2010). Ketika orang menganut persepsi yang salah, maka hal tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan individu yang membawa bencana dan konsekuensi kolektif yang dapat melemahkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Menurut Pennycook (2020),

mispersepsi disebabkan oleh pengaruh dari pemberitaan sebuah informasi yang masih belum bisa ditentukan kebenarannya namun dianggap benar oleh individu tersebut. Lebih lanjut, mispersepsi informasi terjadi karena pengaruh dari maraknya berita bohong yang tersebar di media sosial (Pennycook, 2020).

Adanya mispersepsi masyarakat mengenai COVID-19 dapat mempengaruhi tindakan seseorang berdasarkan apa yang dipersepsikan sehingga hal tersebut berkaitan dengan tindakan kepatuhan seseorang atas peraturan protokol kesehatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pennycook (2020), penyebab mispersepsi pada masyarakat disebabkan oleh tersebarnya banyak berita bohong atau *hoax* seputar COVID-19 yang tersebar di Internet dan Media Sosial. Pada hasil penelitian tersebut, individu tidak dapat mengidentifikasi keakuratan informasi tersebut. Individu lebih mengandalkan intuisi dalam memahami dan menyebarkan kembali informasi yang didapat kepada individu lainnya, serta kurangnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan individu tidak bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah (Pennycook, 2020). Hal itu dibuktikan dengan penelitian Castro, Climent, Oron, dan Poudereux (2021) yang meneliti tentang jenis hoaks di negara Spanyol selama pandemi dari 2353 pesan melalui media sosial Whatsapp yang diteliti terdapat 584 hoaks yang terdiri dari pesan teks (39%), video (30%), dan audio (31%). Berita hoaks yang beredar yaitu tentang pencegahan dan penyembuhan COVID-19. Atas hal tersebut, pada akhirnya masyarakat salah memahami atau salah mempersepsikan tentang virus COVID-19.

Dalam salah satu penelitian oleh Forikes (Lalu dkk, 2021) pada suatu daerah di Lombok Tengah, mispersepsi informasi COVID-19 adalah salah satu faktor utama dalam kenaikan angka penularan. Masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi beberapa wabah seperti campak, kolera dan cacar dimasa lalu, menganggap bahwa COVID-19 bersifat sama saja dan tidak berbahaya. Lalu pendapat tokoh agama yang masih memperbolehkan masyarakat beribadah secara normal di rumah ibadahnya karena alasan lebih takut dengan Tuhan daripada penyakit, turut serta menyebabkan mispersepsi tersebut terjadi. Kemudian *euforia New Normal* yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai “kembali Normal” dengan melaksanakan aktifitas seperti biasa tanpa mengikuti protokol Kesehatan. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang patuh terhadap aturan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Disonansi Kognitif menurut Festinger (1957), adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Didukung oleh Vaughan dan Hogg (2005), disonansi kognitif adalah suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi (sejumlah informasi) yang tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain. Festinger (1957) menyebutkan ada empat sumber terjadinya disonansi kognitif, yaitu:

1. Inkonsistensi Logika yaitu logika berpikir yang mengingkari logika lain

2. Nilai Budaya yang mana kognisi dipengaruhi oleh budaya daerah.
3. Opini Umum yaitu disonansi muncul karena sebuah pendapat berbeda dengan yang menjadi pendapat umum.
4. Pengalaman Masa Lalu, dimana disonansi kognitif muncul bila sebuah kognisi tidak sesuai dengan pengalaman masa lalunya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Forikes (2021) dan Iptidaiyah dkk. (2020), ketidakpatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dapat disebabkan oleh pemahaman yang salah atau mispersepsi informasi pada masyarakat tentang virus COVID-19. Hal ini terjadi karena anggapan sebagian masyarakat bahwa COVID-19 sama dengan penyakit biasa. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Shella Anggarini (2020) dalam jurnal bertajuk “Phenomena in Covid-19 News” yang menyebutkan bahwa pemberitaan tentang COVID-19 cenderung menimbulkan disonansi kognitif dan perubahan afektif pada individu yang mengakses informasi aktual sehari-hari dari berbagai media massa. Oleh karena itu, maraknya pemberitaan tentang COVID-19 di media yang dapat diakses oleh publik, mendorong berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat. Disonansi individu atas berbagai informasi yang diakses mengakibatkan gangguan kognitif. Disonansi kognitif membuat ketidakpatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan semakin besar sebab dampak dari mispersepsi membuat informasi yang diterima kemudian disebarkan ke masyarakat menjadi bias dan pada

akhirnya membuat sebagian masyarakat yang masih kebingungan, dan turut mempersepsikan informasi tersebut kearah yang salah.

Meskipun Indonesia telah mencapai titik stabil dalam penanganan kasus COVID-19 diikuti oleh terselenggaranya vaksinasi yang diadakan oleh instansi terkait seperti TNI-POLRI, namun hingga kini, masih dapat ditemukan sebagian masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Masyarakat beraktifitas tanpa menjaga jarak, memakai masker secara tidak benar, jarang untuk melakukan cuci tangan saat akan masuk ke tempat publik, dan masih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Penulis ingin mengetahui apakah mispersepsi informasi berhubungan dengan menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan proses yang masih diwajibkan dan apakah disonansi kognitif memperkuat hubungan mispersepsi dengan ketidakpatuhan.

1.2 Identifikasi Masalah

Munculnya fenomena pandemi COVID-19 merupakan rintangan baru bagi seluruh dunia. Tidak ada negara yang luput dari dampak pandemi COVID-19. Pada awal penyebaran, masyarakat bahkan pemerintah masih menganggap sepele tentang virus COVID-19. Menurut Kompas (Bayu Galih, 2020) dalam tajuk berita “Kilas Balik 6 Bulan COVID-19: Pernyataan Kontroversial Pejabat soal Virus Corona...”, setidaknya telah muncul beberapa pendapat yang menyepelekan virus

COVID-19. Pernyataan itu berasal dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang memberikan *statement* seperti pemberitaan COVID-19 yang tidak perlu dibesar-besarkan, COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena doa, hingga COVID-19 dapat sembuh sendiri. Pemberian *statement* tersebut juga diimbangi dengan buruknya penanganan virus pada masa awal pandemi. Dampaknya adalah sepanjang tahun 2020 hingga 2021, angka kematian oleh COVID-19 meningkat pesat. Pemerintah akhirnya kewalahan dan memutuskan untuk memerangi COVID-19 yang dalam penganggapanannya oleh masyarakat bahwa pemerintah telah menyerah dan memilih untuk berdamai dengan COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah membuat peraturan, kebijakan dan memberikan bantuan yang lebih matang dengan tujuan untuk menanggulangi penularan COVID-19.

Ketidakpatuhan bisa didefinisikan sebagai keengganan untuk melakukan perubahan perilaku sesuai dengan perintah langsung yang disampaikan oleh otoritas tertentu (Brehm & Kassir, 1996). *Civils Disobedience* muncul karena individu atau sebagian golongan merasa tidak senang atau tidak puas atas suatu situasi yang dianggap memberatkan individu atau golongan tersebut.

Pada penelitian Iptidaiyah, Abdul, Junaidin, dan Usman (2020) dalam penelitiannya yaitu kepatuhan dan perilaku *covidiot* di kelurahan Oi Fo'o kota Bima, masyarakat tidak patuh dengan kebijakan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menanggulangi pandemi. Anggapan bahwa COVID-19 tidak sebahaya yang diberitakan oleh media massa, merasa kebal dan tidak akan

terkena dampaknya, rasa ingin memberontak dan tidak mau mengikuti peraturan pemerintah karena telah lama dikekang, anggapan bahwa COVID-19 hanyalah sebuah alat politik, dan sikap egois dengan mementingkan kepentingan dan kepuasan diri sendiri daripada kebaikan masyarakat yang lebih besar dalam memerangi COVID-19, adalah beberapa alasan mereka tidak patuh dalam mengikuti peraturan COVID-19.

Mispersepsi, adalah “kasus di mana keyakinan orang tentang hal-hal faktual tidak didukung oleh bukti yang jelas dan pendapat ahli”, dimana definisi yang mencakup keduanya menimbulkan keyakinan yang salah dan tidak berdasar tentang informasi tersebut (Nyhan & Reifler, 2010). Mispersepsi adalah dampak dari misinformasi yang mengacu pada komunikasi yang “salah, menyesatkan, atau berdasarkan informasi yang tidak berdasar” (Nyhan & Reifler, 2010).

Pada penelitian Forikes (Lalu dkk, 2021) di Lombok Tengah, mispersepsi informasi COVID-19 adalah salah satu penyebab utama dalam kenaikan angka penularan. Anggapan masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi beberapa wabah seperti campak, kolera dan cacar dimasa lalu, bahwa COVID-19 bersifat sama saja dan tidak berbahaya. Pendapat tokoh agama setempat yang masih memperbolehkan masyarakat beribadah secara normal di rumah ibadahnya karena alasan ketaatan dalam beragama. Kemudian *euforia New Normal* yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai “kembali Normal” dengan melaksanakan aktifitas seperti biasa tanpa mengikuti protokol Kesehatan.

Disonansi Kognitif menurut Festinger (1957), adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Didukung oleh Vaughan dan Hogg (2005), disonansi kognitif adalah suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi (sejumlah informasi) yang tidak konsisten atau tidak sesuai satu sama lain.

Pada penelitian yang dilakukan Shella Anggarini (2020) dalam jurnal bertajuk “Phenomena in Covid-19 News” yang menyebutkan bahwa pemberitaan tentang COVID-19 cenderung menimbulkan disonansi kognitif dan perubahan afektif pada individu yang mengakses informasi aktual sehari-hari. dari berbagai media massa. Oleh karena itu, maraknya pemberitaan tentang Covid-19 di media yang dapat diakses oleh publik, mendorong berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat. Disonansi individu atas berbagai informasi yang diakses mengakibatkan gangguan kognitif.

Dalam penelitian ini, Penulis ingin menguji hubungan mispersepsi informasi berhubungan dengan menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan proses yang masih diwajibkan dan apakah disonansi kognitif memperkuat hubungan mispersepsi dengan ketidakpatuhan. Urgensi dari penelitian ini adalah meskipun Indonesia telah mencapai titik stabil dalam penanganan kasus COVID-19 diikuti oleh terselenggaranya vaksinasi yang diadakan oleh instansi terkait seperti TNI-POLRI, namun berdampak dengan mengendurnya pengawasan

masyarakat dan instansi terkait terhadap pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat beraktifitas tanpa menjaga jarak, memakai masker secara tidak benar, jarang untuk melakukan cuci tangan saat akan masuk ke tempat publik, dan masih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan demikian, maka rumusan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat hubungan antara mispersepsi informasi dan disonansi kognitif sebagai variabel moderator dengan ketidakpatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19?

Dari pertanyaan penelitian utama, dirumuskan permasalahan khusus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara mispersepsi terhadap ketidakpatuhan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19?
2. Apakah terdapat hubungan antara disonansi kognitif terhadap ketidakpatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19?

3. Apakah terdapat pengaruh disonansi kognitif sebagai variabel moderator dengan hubungan antara mispersepsi terhadap ketidakpatuhan mengikuti protokol kesehatan COVID-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara mispersepsi dan ketidakpatuhan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan disonansi kognitif sebagai variabel moderator.

Dari tujuan penelitian utama, dirumuskan tujuan khusus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya hubungan antara mispersepsi dan ketidakpatuhan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
2. Mengetahui adanya hubungan antara disonansi kognitif dan ketidakpatuhan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
3. Mengetahi adanya interaksi antara disonansi kognitif dengan mispersepsi dengan hubungannya terhadap ketidakpatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan COVID-19

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Dengan diperolehnya hasil penelitian mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara mispersepsi terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan disonansi kognitif sebagai variabel mediator, maka diharapkan dapat:

- a. Mengembangkan penelitian di masa yang akan datang di bidang ilmu psikologi yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
- b. Turut membangun teori di bidang psikologi yang sudah ada, khususnya tentang mispersepsi, ketidakpatuhan, dan disonansi kognitif.

1.5.2 Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat rumusan kebijakan dengan jelas dan berorientasi pada menyejahterakan seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak menimbulkan mispersepsi dan ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang dapat mengganggu upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19.